

Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe

Mayang Terapulina Br Karo¹, Ihsan Hikmatullah², Maudyta Dwi Puteri³, Qotrun Nada Aulia⁴, Nur Safa Shafira⁵

TransBorders*

Abstract

The Shoushika phenomenon is a decrease of children population in Japan. This issue is caused by the continuing decline in the number of births and the rapid growth of the elderly population. Declining populations and aging populations have a substantial impact on the Japanese economy and security due to the lack of productive age population to fill employment sectors in Japan. Shoushika also affects Japanese identity as a country that has been known for its ethnically and culturally homogenous people. As the Japanese government forced to employ foreign workers, the ethnic and cultural heritage of Japanese society could slowly fade if the trend of increasing immigrant workers continue to grow. This phenomenon is also feared to have an impact to the harmony and national security of Japan as a state. The Japanese government, particularly in Shinzo Abe's administration, then established a policy that was considered to be able to solve Shoushika phenomenon. However, this policy caused a new problem for the Japanese government itself. Therefore, the Japanese government has to reconsider the solution to this matter.

Keywords: Shoushika; Population; Security; Immigrants; Policy

Abstrak

Fenomena Shoushika merupakan penurunan populasi anak di Jepang, fenomena ini tidak terlepas dari jumlah kelahiran yang terus menurun serta pesatnya pertumbuhan penduduk lansia. Populasi yang menurun dan populasi yang menua berdampak besar pada sektor ekonomi dan keamanan Jepang karena disebabkan oleh kurangnya usia produktif untuk mengisi sektor pekerjaan di Jepang, dan juga terhadap warisan budaya Jepang dengan etnis yang homogen itu sendiri. Alhasil Jepang mendatangkan TKA, sehingga warisan etnik dan budaya masyarakat Jepang tersebut perlahan bisa luntur jika tren peningkatan imigran terus berkembang. Fenomena ini juga dikhawatirkan berdampak pada keharmonisan dan keamanan nasional negara Jepang. Untuk mengatasi fenomena tersebut, pemerintah Jepang terutama pada masa pemerintahan Shinzo Abe kemudian menetapkan kebijakan yang dianggap dapat mengatasi fenomena shoushika tersebut. Namun kebijakan ini menimbulkan masalah baru bagi pemerintah Jepang sendiri dan membuat pemerintah Jepang harus memikirkan kembali solusi dari masalah tersebut.

Kata Kunci: Shoushika; Kependudukan; Keamanan; Imigran; Kebijakan

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Email: mayanglinaa@gmail.com.

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

⁴ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

⁵ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

* Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Email: transborders.journal@unpas.ac.id.

Pendahuluan

Suatu wilayah akan dapat disebut sebagai sebuah negara adalah ketika wilayah tersebut memiliki pemerintahan, hukum, serta pengakuan nasional lainnya, dan yang terpenting adalah keberadaan warga negara. Jumlah penduduk suatu negara selama masih ada perkawinan dan kelahiran, mereka akan terus mengalami perkembangan. Namun terkadang kependudukan menjadi masalah nasional. Walaupun angka harapan hidup di negara maju seperti Jepang cenderung tinggi, tetapi angka kelahiran yang rendah menjadi momok permasalahan di negara ini sehingga di Jepang muncul sebuah fenomena yang disebut dengan shoushika atau fenomena rendahnya angka kelahiran di masyarakat. Shoushika didefinisikan sebagai situasi dimana jumlah kelahiran terus menerus dibawah tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi. Shoushika adalah sebuah masalah besar mengenai krisis demografi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jepang pada masa ini.

Fenomena Shoushika ini kemudian menjadi semakin marak semenjak semakin bertambahnya wanita yang bekerja karena merasa sulit untuk mengatur jam kerja dan merawat anak-anak mereka pada saat yang bersamaan yang berakibat pada penundaan untuk mempunyai anak atau berkeluarga, hingga kemudian mengakibatkan penurunan pertumbuhan bayi di Jepang dan akan berkurangnya generasi penerus yang tidak terlepas dari perubahan pandangan wanita di Jepang tentang masalah pekerjaan yang berakibat pada wanita Jepang, yang membuat budaya dan etnik menjadi tergerus dan dinilai bisa mengganggu ketentraman masyarakat Jepang.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, pemerintah Jepang kemudian merumuskan kebijakan yang dinilai dapat menyelesaikan fenomena “*regular history*” tersebut. Namun kebijakan ini justru membawa masalah baru bagi pemerintah Jepang sendiri, dan memaksa pemerintah

Jepang untuk mempertimbangkan kembali cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Fenomena Shoushika menarik untuk dibahas karena perkembangannya yang cukup pesat hingga dampaknya yang cukup besar terhadap keamanan non-tradisional bagi negara Jepang. Timbulnya masalah krisis demografi yang terjadi di negara maju seperti Jepang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, satu diantaranya adalah karena kebijakan pemerintah Jepang itu sendiri yang lebih mengutamakan bidang perekonomian hingga kemudian membuat konstruksi sosial terhadap rakyatnya terutama bagi para wanita untuk lebih dapat mengutamakan karir dibandingkan dengan memiliki anak.

Ketidakseimbangan yang terjadi dalam kebijakan pemerintah Jepang terutama pada masa pemerintahan Shinzo Abe dalam sektor ekonomi dan demografi ini kemudian menjadi suatu kajian yang menarik, ditambah jika melihat bagaimana dinamika masyarakat Jepang yang bersifat homogen dan berintegritas tinggi yang kemudian harus dihadapkan dengan datangnya pekerja dari luar negeri sebagai suatu akibat dari fenomena shoushika itu sendiri. Pada bagian pembahasan, artikel ini akan menjelaskan mengenai dinamika populasi masyarakat di Jepang, peristiwa krisis demografi atau fenomena Shoushika yang terjadi di Jepang bersamaan dengan dampak yang ditimbulkan serta akan membahas mengenai kebijakan pemerintah Jepang terutama pada masa kepemimpinan Shinzo Abe terhadap fenomena Shoushika ini.

Kerangka Teori

Copenhagen School

Dalam buku yang berjudul *Security: A Framework for Analysis* yang ditulis oleh Buzan, Waeber, Wilde, dikatakan bahwa studi yang menyangkut dengan keamanan adalah tentang *survival*. Dalam buku tersebut dijelaskan studi keamanan

cakupannya tidak hanya militer dan negara saja tapi lebih meluas, seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan, ketiga penulis tersebut merumuskan bahwa isu dalam proses keamanan dibagi menjadi 3 tahapan, seperti tahap non-politis, politis, dan tersekuritasi. Isu yang berada pada tahap non-politis adalah ketika isu tersebut hangat didiskusikan oleh masyarakat dan belum jadi pembicaraan di level pemerintah, setelah pembicaraan tersebut masuk dalam ranah politik, masalah tersebut akan menjadi pembicaraan, perdebatan di tingkat pemerintah, masalah tersebut akan tersekuritasi saat aktor *state* maupun *non-state*, merundingkan dan memutuskan untuk menyepakati adanya suatu ancaman tersebut dan dibutuhkan *emergency measure* dalam mengatasi ancaman tersebut.

Proses sekuritisasi berfokus pada bahasa sebagai alat untuk menyampaikan isu atau pesan oleh para aktor sekuritisasi untuk menyampaikannya langsung pada masyarakat atau kelompok individu akan adanya ancaman. *Speech act* merupakan alat bagi para aktor sekuritisasi untuk mengkonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan untuk memberitahukan sebuah peringatan pada masyarakat akan bahaya dari ancaman tersebut. Penggunaan *speech act* dalam teori sekuritisasi Copenhagen sangatlah penting dalam penentu keberhasilan atau kegagalan dalam proses sebuah sekuritisasi. Mazhab Copenhagen dikatakan berhasil jika masyarakat sebagai *referent object* atau pihak yang terancam yakin adanya ancaman dari sebuah masalah. *Referent object* bisa dari individu atau kelompok masyarakat dan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan nasional, lingkungan, dan ekonomi yang mencakup kelangsungan hidup manusia.

Penyusutan populasi di Jepang akibat dari fenomena Shoushika yang akan dibahas dalam artikel ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap berkurangnya ketenagakerjaan yang kemudian berimbas juga pada

kesejahteraan masyarakat, terutama tenaga kerja pada industri layanan kesehatan dikarenakan populasi di Jepang yang semakin didominasi oleh masyarakat lansia.

Dalam hal ini ditinjau dari teori keamanan non-tradisional, ruang lingkup isunya sudah meluas. Menurut Barry Buzan, ancaman non-tradisional terbagi menjadi beberapa sektor, yakni militer atau *forceful coercion*, sektor politik seperti otoritas, status pemerintah, dan pengakuan, kemudian ada sektor ekonomi yang mencakup permasalahan dalam perdagangan, produksi, dan finansial, ada pula sektor sosial (*collective identity*) sertasektor lingkungan (*human activity & the planetary biosphere*). Menurutnya, agenda keamanan suatu negara bisa diperluas, namun kecenderungan negara sentris masih kental, pengkajian Copenhagen School memberikan pergeseran *referent object* dari negara sebagai objek dan menjadi kedaulatan yang diamankan tapi ditinjau dari teori ini masyarakat individu menjadi *referent* dan sebagai identitas yang diamankan.

Barry Buzan melihat negara aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi, negara berhak melakukan keamanan sebagai tindakan terhadap suatu ancaman. Isu demografi di Jepang diidentifikasi suatu isu dari non politis hingga politik, objek (negara atau masyarakat) yang secara eksistensi terancam dan harus diamankan.

Berangkat darisana, isu krisis demografi yang berawal dari penyusutan jumlah angka kelahiran karena banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi. Salah satunya adalah pola pikir masyarakat Jepang yang semakin maju, dari pola pikir tersebut mempengaruhi setiap keputusan yang mereka buat terutama perihial tidak inginnya memiliki anak atau keturunan dan memutuskan untuk melajang, hal tersebut mulanya hanya merupakan masalah non politis dimana belum adanya intervensi pemerintah tetapi seiring berjalannya waktu pola pikir masyarakat yang demikian mempengaruhi sektor yang lebih luas, dan

mengakibat penyusutan populasi dan semakin berkembangnya masyarakat lansia dan menciptakan ketidak stabilan rasio populasi, salah satu dampaknya Jepang kekurangan tenaga kerja, karena menurunnya masyarakat diusia produktif, hal ini menjadi ancaman bagi negara dan dikeluarkan suatu kebijakan dari isu tersebut (Buzan & Hansen, 2009).

Untuk menganalisis isu demografi ini melalui pendekatan Copenhagen School dapat melihat negara dan masyarakat sebagai aktor yang tersekuritisasi merasakan dilema akan identitas negara Jepang melalui kebijakan dari pemerintahan terkait dengan pembukaan akses terhadap Tenaga Kerja Asing, Dibawah rancangan tersebut, pemerintah Jepang kemudian menetapkan visa kerja yang dibatasi hanya lima tahun saja, dan ketentuannya para pekerja asing dilarang membawa anggota keluarganya ke Jepang dan mengharapakan para pekerja asing kembali ke negara asalnya. Tindakan tersebut merupakan penyelesaian ancaman yang diambil oleh pihak Jepang, dalam Copenhagen School hal ini dinamakan *speech act* yang dimana merujuk pada pernyataan dan tindakan pemerintah dalam wacana keamanan negaranya.

Teori Konstruktivisme

Perspektif Konstruktivisme awal mulanya berkembang pada masa pasca Perang Dingin yang muncul karena adanya kegagalan dari teori-teori arus utama. Teori ini berbeda dari teori arus utama, dimana aktornya telah mengalami proses sosialiasi. Teori ini merupakan pendekatan yang dalam analisis hubungan antar aktornya mengusung teori kebudayaan dalam studi Hubungan Internasional.

Konstruktivisme terbentuk dari bagaimana kita melihat sebuah pola interaksi yang terdiri dari beberapa unsur lain seperti norma, identitas, intensi, dan bahasa yang menjadi bagian penting dari proses historis hubungan antar subjek. Para aktor politik global meyakini bahwa

konstruktivisme merupakan hal yang terjadi karena adanya pengalaman serta interaksi dengan lembaga internasional sehingga diterapkan sebagai suatu kebijakan negara tersebut.

Hubungan Internasional dalam pandangan konstruktivisme bisa dibilang hasil dari sebuah konstruksi sosial. Konstruktivisme mempunyai cara pandangnya tersendiri dalam menilai perang dan damai yakni bisa berubah sesuai dengan konteks budaya dan historis tertentu. Cara pandang konstruktivis ini merupakan *alternative* dari teori-teori arus utama lainnya yang bisa dijadikan sebagai suatu acuan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada (Hadiwinata, 2017).

Dalam teori konstruktivisme mengenai tatanan atau struktur sosial yang di jelaskan oleh Alexander Wend, ia menjelaskan bahwa konstruktivisme ini sedikitnya memiliki tiga komponen, yakni pengetahuan bersama, sumberdaya material dan juga praktik. Pengetahuan bersama disini adalah sebuah pengetahuan yang kemudian terkonstruksi dari adanya interaksi yang terjadi diantara banyak aktor. Hal ini cenderung bersifat sangat dinamis yang juga menjadi variabel untuk mengatur, menata dan turut menjadi sebuah acuan bagi para aktor dalam berperilaku. Berdasarkan komponen ini, dapat dilihat bahwasanya konstruktivisme ini adalah gagasan yang kemudian dikonstruksi dari adanya interaksi yang terjadi antara para aktor (Pramono & Purwono, n.d.).

Untuk menggambarkan konsep konstruktivisme ke dalam materi pembahasan fenomena Shoushika berdasarkan konsep tersebut, dapat dilihat mulai dari pembangunan sangat pesat di Jepang yang membuat jepang menjadi negara maju dalam waktu yang relatif singkat hingga membuat masyarakat Jepang saat ini menjadi ambisius dalam melakukan semua hal. Etos kerja dan disiplin tinggi yang dimiliki masyarakat Jepang kemudian menimbulkan konstruksi

terhadap pemikiran individu di Jepang menjadi enggan berkomitmen untuk mempunyai anak karena akan menghabiskan banyak waktu yang dianggapnya sia-sia.

Ditambah dengan munculnya pemikiran atau gagasan yang ditanamkan oleh pemerintah Jepang melalui kebijakan *Womonomics* kepada wanita di Jepang yang dimana adanya tuntutan bahwa apabila wanita ingin hidup secara mandiri, sukses dalam bidang ekonomi dan apabila wanita ingin melanjutkan pekerjaan, mereka disarankan untuk menunda memiliki anak. Karena pekerjaan yang disandingkan dengan mengurus anak sangatlah memberatkan ditambah dengan biaya mengurus anak yang tidaklah murah. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwasanya idea atau ide gagasan dari pemerintah Jepang dapat meng-konstruksi pemikiran masyarakatnya. Ditunjukkan dengan adanya fenomena *Shoushika* yang menyebabkan penurunan angka kelahiran di Jepang karena masyarakatnya lebih mengutamakan karir individu dibanding berkeluarga.

Dinamika Pertumbuhan Masyarakat Jepang

Masyarakat adalah hubungan satu orang atau sekelompok orang-orang yang hidup secara individu maupun mengelompok dan berinteraksi satu sama lain yang saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang cenderung hidup mandiri, dalam rentan waktu yang cukup lama manusia dapat hidup bersama-sama, tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar aktivitas atau kegiatan yang ada pada kelompok atau kumpulan manusia di wilayah tersebut.

Negara Jepang adalah negara dengan kemajuan penduduk yang cukup tinggi dapat dilihat dari jumlah penduduk Jepang saat ini berdasarkan elaborasi data terbaru dari Worldometer dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana terdapat 126,476,461 jiwa per Sabtu, 27 Maret 2021. Kepadatan penduduk di Jepang adalah 347 per Km² (899 jiwa per mil persegi), dengan total luas tanah adalah 364.555 Km² (140.755 mil persegi). 91,8% dari populasi tinggal di perkotaan (116.099.672 jiwa pada tahun 2020) dan sekitar lebih dari 8 juta dari masyarakat Jepang tinggal di Tokyo. Usia rata-rata di Jepang adalah 48,4 tahun. Jepang juga menjadi negara kesebelas yang bergantung terhadap negara lain (Worldometer, 2020).

Karena terus berkurangnya tenaga kerja usia muda yang dinilai produktif, sehingga Jepang banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Dengan adanya migrasi massal, Jepang telah meningkatkan populasi penduduk asing menjadi 2,3 juta. Pada 2016, jumlah penduduk asing meningkat 150.000, membantu mengurangi separuh penurunan populasi secara keseluruhan.

Sensus penduduk pada tahun 2010 melaporkan total populasi penduduk Jepang adalah sebanyak 128.06 juta jiwa, angka tersebut sudah termasuk dengan penduduk non-Jepang (pendatang, imigran, expatriat). Proyeksi sensus penduduk di Jepang dilakukan oleh *National Institute of Population and Social Security Research in Japan*, guna memprediksi penurunan populasi di Jepang. Menurut penelitian institusi ini, Jepang diperkirakan akan memasuki periode penurunan populasi yang lama. Populasi diperkirakan akan turun menjadi sekitar 116,62 juta pada tahun 2030, lalu menurun dari 100 juta menjadi 99,13 juta pada tahun 2048, dan terus turun menjadi 86,74 juta pada tahun 2060 (*National Institute of Population and Social Security Research in Japan*, 2012).

Jepang juga menjadi negara yang harapan hidup penduduknya paling tinggi, yaitu diatas usia 80 tahun. Ini membuat

Jepang dipenuhi dengan masyarakat kalangan usia tua, yang dianggap sudah tidak produktif. Rata-rata selama setengah abad terakhir usia menikah pertama perempuan di Jepang meningkat dari 23,0 tahun pada tahun 1950 menjadi 28,8 tahun pada 2010 (Konishi et al., 2018). Faktor pertumbuhan dan kemajuan negara Jepang dominan ditunjang oleh sikap penduduknya yang memiliki semangat kerja tinggi, berpendidikan, dan juga penguasaan teknologi yang kemudian berdampak sangat besar terhadap kemajuan negara Jepang itu sendiri melalui bidang ekonomi dan sektor yang lainnya. Sektor perekonomian yang cukup unggul di negara Jepang adalah sektor industri, seperti industri manufaktur sebagai salah satu kekuatan negara Jepang. Jepang dikenal sebagai negara industri penghasil berbagai macam peralatan konstruksi serta pertambangan, alat-alat otomotif, kapal & komunikasi, serta bahan kimia. Majunya industri di Jepang juga turut didukung dengan adanya energi listrik yang tersedia, buruh yang cekatan dan terampil serta etos kerja yang tinggi, dan juga turut didukung oleh alat sarana transportasi di Jepang yang sudah berkembang maju. Berbagai jenis mineral juga tersedia di Jepang meskipun mineral bukan sumber utama. Sebagai negara industri, kegiatan jual beli di Jepang juga memiliki potensi karena suasana yang tergolong ramai dan didukung oleh fasilitas transportasi baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

Masyarakat Jepang juga unggul dalam bidang teknologi. Keunggulan masyarakatnya dalam penguasaan teknologi ini menjadi sebuah dasar pengembangan dalam berbagai macam produk untuk dieskpor. Tingginya kualitas sumber daya masyarakat Jepang tentunya menjadi faktor yang memengaruhi kemajuan negara Jepang itu sendiri. Tidak lupa, masyarakat Jepang juga dikenal dengan pendidikan melek hurufnya yang tinggi.

Melihat penduduk dan masyarakat di Jepang yang berkualitas dan memiliki

integritas tinggi, perlu diketahui bahwasanya golongan wanita modern di Jepang saat ini juga sudah termasuk di dalamnya. Akibat dari adanya globalisasi dan modernisasi yang terjadi di Jepang tidak hanya memberikan dampak baik bagi masyarakat Jepang di sektor industri dan teknologi. Modernisasi ini juga turut memberikan dampak terhadap pola pikir masyarakat di Jepang terutama bagi para kaum wanita di negara tersebut. Bagi kaum wanita di Jepang, karir menjadi salah satu fokus utama mereka untuk hidup. Dimana berkarir bagi mereka menjadi sebuah alat pembuktian diri, dan bekerja dapat memungkinkan wanita untuk bisa mengekspresikan mereka sebagai suatu kebanggaan atas pencapaian yang mereka raih sendiri, apalagi jika prestasi wanita itu mendapat penghargaan atau *feedback* yang positif dari banyak orang.

Hingga kemudian memunculkan sebuah persepsi dan konstruksi sosial dimana apabila wanita ingin hidup secara mandiri, sukses dalam bidang ekonomi dan apabila wanita ingin melanjutkan pekerjaan, mereka disarankan untuk menunda memiliki anak. Hal ini karena pekerjaan yang disandingkan dengan mengurus anak sangatlah memberatkan ditambah dengan biaya mengurus anak yang tidaklah murah. Wanita di Jepang juga melihat pernikahan adalah suatu pilihan dan bukan sebuah kewajiban atau keharusan yang perlu dilakukan sehingga mereka bisa bebas untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dan wanita Jepang yang lebih menyukai berkarir dan mereka tidak suka mencampuri kehidupan pernikahannya dengan karir. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebabnya. Adapun pertumbuhan ekonomi di Jepang yang sangat pesat, sehingga cara hidup dan kemakmuran mengalami perubahan di masyarakat Jepang.

Fenomena Krisis Demografi atau Shoushika di Jepang

Dalam isu krisis demografi di Jepang yang diamati menggunakan pendekatan *Copenhagen School*, sangat berkorelasi isunya dengan apa dan siapa yang dijadikan objek keamanan atau *referant object* yang awal mulanya ancaman keamanan dinegara Jepang lebih berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi pasca perang hingga saat ini ancaman penyusutan populasi di Jepang akan memberikan ancaman pada keamanan masyarakat Jepang secara tidak langsung, dikarenakan akan adanya kekhawatiran penduduk Jepang dengan hadirnya tenaga kerja asing yang bisa mengganggu kestabilan sosial dan menciptakan tenaga kerja yang murah. Dalam teori sekuritisasi *Copenhagen School*, Barry Buzan menekankan kepada keamanan negara dan masyarakat, pada tingkat keamanan ini dinyatakan dengan adanya ancaman yang aktual, yang dimana aktor politik bisa menjadi sebuah ancaman dan identitas yang terancam.

Demografi atau kependudukan berkaitan erat dengan dinamika populasi manusia, isu kependudukan tidak hanya mencakup di masalah negara-negara tertentu saja tetapi luas pokok bahasan isunya semakin luas hingga kancah Internasional. Hal ini karena dinamika demografi yang turut mempengaruhi sektor-sektor lain seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, kesehatan, dan lainnya. Demografi juga merupakan bidang studi ilmu yang menganalisa stabilitas dan perubahan populasi manusia berdasarkan ukuran, komposisi, dan distribusi ruang. Kelahiran (*fertility*), kematian (*mortality*) dan migrasi merupakan akar utama dalam demografi.

Populasi manusia di negara-negara berkembang biasanya terus bertumbuh, bahkan pemerintah sampai kualahan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk di negaranya. Perkembangan populasi tertinggi terdapat di negara-negara kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Namun di negara maju, terdapat kondisi yang berbeda dimana populasi manusianya

terus menyusut. Angka kelahiran semakin berkurang sementara angka kematian terus bertambah. Fenomena ini disebut dengan krisis demografi, yang disebabkan oleh berbagai pola-pola faktor yang identik.

Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat kelahiran adalah kemajuan dalam bidang teknologi dan obat-obatan. Contoh dari akibat kemajuan yang terjadi adalah membuat pil pengontrol kelahiran (pil KB = Keluarga Berencana) mudah diakses oleh siapapun. Lalu dengan kemajuan teknologi, hari ini manusia mampu mendapatkan kepuasan seksual bukan hanya dari manusia lain, namun dengan berbagai alat dan mainan seks. Selain itu terdapat faktor penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan, atau karir. Fenomena ini terjadi di banyak negara di Eropa Timur dan Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan.

Krisis demografi di Jepang disebut dengan *Shoushika*, lebih disorot oleh berbagai media karena Jepang merupakan negara dengan ekonomi yang mapan. Namun populasi usia muda produktif terus menurun dan berimbas kepada kemunduran ekonomi.

Shoushika juga ditakutkan dapat berdampak pada kelangsungan hidup warisan tradisi dan budaya masyarakat Jepang. Dari gaya hidup individualistik, hingga peran *gender* yang telah berubah, membuat wanita-wanita di negara maju tidak tertarik untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Konsep keluarga tradisional dianggap kuno dan terlalu menghabiskan banyak biaya. Sehingga wanita lebih memilih untuk membangun karir dan *men-support* kebutuhan diri sendiri. Belum lagi harapan hidup yang tinggi membuat kalangan individu muda harus menanggung kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia.

Adanya perubahan cara berpikir wanita Jepang merupakan salah satu faktor menurunnya jumlah kelahiran di Jepang atau biasa disebut *Shoushika*. Keputusan para wanita Jepang dalam menentukan

tidak memiliki anak berpengaruh terhadap jumlah kelahiran tiap tahunnya. Dinamika kenaikan dan penurunan jumlah kelahiran bayi dasarnya sudah terjadi sejak 1970 dan hingga saat ini dampaknya akan langsung terjadi pada komposisi demografi, dimana penduduk di Jepang lebih didominasi oleh lansia dan usia produktif di Jepang justru semakin menurun.

Sejak tahun 1974, angka fertilitas di Jepang terus mengalami penurunan, seperti yang terjadiditahun 2005 dimana angka kelahiran bisa mencapai 1.25 dan bahkan hingga pada tahun 2021 ini angka fertilitas tersebut masih berada dibawah angka 1,5. Angka kelahiran per-tahun pun ikut berkurang dimana pada tahun 1970-an lebih dari 2 juta dan pada tahun 2005 mencapai 1 juta. Pada tahun 2019, bayi yang lahir sekitar 864.000 dengan jumlah kematian yang mencapai 512.000, adanya penurunan ini dikarenakan semakin berkurangnya perempuan berusia 25-39 tahun, jumlah pasangan menikah pun ikut menurun ketika pasca perang dengan titik terendah mencapai 583.000 dan turun 3000 pada tahun 2018 (Salengke, 2019).

Dalam laju pertumbuhan penduduk, populasi di Jepang pun turut mengalami penurunan. Tahun 2005 perkembangan populasi di Jepang menurun adanya peningkatan kecil terjadi di tahun 2006 dan 2007. Populasi yang menurun ini akan berakibatkan negativitas populasi nantinya.

Faktor penentu dalam penambahan jumlah penduduk di suatu negara ditentukan oleh angka perkawinan dan kelahiran. Di negara berkembang seperti di Indonesia misalnya, membludaknya jumlah penduduk yang tentunya kian bertambah semakin sulit untuk ditangani bahkan hingga diluncurkannya program kerja pemerintah dalam menanggulangi peningkatan jumlah penduduk.

Sangat berbeda dengan kondisi yang ada di negara maju seperti Jepang, yang mengalami permasalahan peningkatan jumlah penduduk, malah penduduknya semakin berkurang tiap tahunnya dan menurunnya angka kelahiran

bayi. Apabila hal ini terus terjadi, maka kemungkinan penduduk asli sana akan punah karena tidak adanya regenerasi. Permasalahan demografi di Jepang pun berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku dalam masyarakat sendiri.

Masyarakat di Jepang saat ini sudah banyak yang tidak ingin menikah karena kebutuhan hidup yang semakin meningkatkan dan budaya yang individual menyendiri dengan kecanggihan teknologi, hal ini masuk juga ke dalam fenomena Shoushika. Peningkatan penuaan populasi Jepang dibidang cukup pesat perkembangannya dibandingkan dengan negara lain. Secara tidak langsung jumlah penduduk lansia di Jepang semakin meningkat.

Fenomena Shoushika pada saat ini terjadi karena banyaknya penduduk Jepang yang tidak ingin menikah. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, pernikahan dengan kehadiran seorang anak atau keturunan akan menjadi beban, banyak sekali masyarakat modern di Jepang yang memutuskan untuk menunda bahkan tidak menikah, hal inilah yang menyebabkan kelahiran per-tahunnya menurun. Faktor yang menyebabkan penurunan angka kelahiran di Jepang juga berkaitan juga dengan karir perempuan muda Jepang. Semakin lambat usia menikah akan berpengaruh pada tingkat kelahiran anak yang faktornya dari usia produktif seorang wanita, dan lagi melahirkan dalam usia lanjut akan beresiko.

Perubahan kondisi lingkungan masyarakat Jepang membuat para wanita memiliki keharusan untuk bekerja, mengingat keadaan ekonomi yang tidak stabil kemudian membentuk konstruksi pemikiran pada kaum perempuan untuk berhak mendapatkan kesetaraan dengan pria.

Hal ini pula yang mempengaruhi *mindset* wanita sana mengenai pernikahan. Pernikahan tradisional Jepang merupakan pernikahan perjodohan (*miai kekkon*) tetapi saat ini pemikiran bahwa selayaknya pernikahan terjadi atas kemauan sendiri

bukan atas paksaan orang lain dengan dukungan dari gerakan feminis lebih mendominasi di kalangan masyarakat Jepang terutama yang perempuan.

Dampak Fenomena Shoushika bagi Negara Jepang

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan cara pandang generasi muda Jepang terutama wanita dalam menilai sebuah pernikahan, keluarga, dan anak merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi munculnya fenomena Shoushika di negara Jepang. Pengaruh yang ditimbulkan Shoushika ini turut memengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan tentunya kepada masalah kependudukan.

Fenomena ini turut mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Jepang dimasa yang akan datang. Penurunan populasi dan angka kelahiran anak-anak akan berdampak pada generasi yang semakin menua. Dampak dari Shoushika ini telah menjadikan negara Jepang kekurangan tenaga pekerja akibat dari minimnya usia produktif masyarakat Jepang itu sendiri. Hal ini mendorong Jepang untuk mencari tenaga kerja dari luar negeri. Sebagai jalan keluar untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri yang berkurang, pemerintah Jepang akhirnya mempermudah visa untuk para pekerja asing, namun sebagian masyarakat yang masih konservatif mengkhawatirkan kehidupan sosial masyarakat Jepang. Harapan sebelumnya dari kebijakan ini adalah agar banyak pekerja asing yang dapat mengisi kekosongan posisi di sektor pekerjaan di Jepang.

Namun ternyata kebijakan ini justru menimbulkan gejala di masyarakat yang beranggapan adanya tenaga kerja asing ini akan mengganggu keharmonisan masyarakat dan keamanan nasional Jepang. Masyarakat Jepang yang cenderung homogen ini dinilai akan sulit berasimilasi dengan pekerja asing yang notabene berbeda, baik secara kultur maupun bahasa.

Semakin banyak perbedaan maka akan semakin banyak kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jepang yang merupakan negara kepulauan ternyata juga pernah terisolir dari dunia luar. Dimana pada masa pertengahan abad ke-19, orang yang keluar atau masuk Jepang bisa saja dihukum mati (Yusy & Rindu, 2011). Kondisi negara Jepang yang homogen tentunya membuat negara ini memiliki karakteristik budaya yang sangat kental & kuat. Berdasarkan hal tersebut, bisa dilihat bahwa kekhawatiran masyarakat Jepang yang timbul kepada imigran dan pekerja asing ini disebabkan juga oleh adanya rasa takut akan kehilangan pekerjaan, kerusuhan budaya, dan juga kekhawatiran masyarakatnya terhadap kejahatan yang akan lebih meningkat di Jepang.

Dampak fenomena Shoushika melalui pendekatan Copenhagen school melihat negara dan masyarakat sebagai aktor yang tersekritisasi merasakan dilema akan identitas negara Jepang karena mereka ingin mempertahankan keberagaman etnis dan budaya yang dimana mereka tidak dengan mudah membiarkan budaya asing dari imigran masuk ke Jepang, mereka mengkhawatirkan disatu sisi dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembukaan akses terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA), budaya Jepang akan tersingkir, namun karena adanya pergeseran demografi, para pembuat kebijakan tetap membela imigrasi sebagai solusi yang potensial atau setidaknya faktor-faktor yang dapat menangani beberapa masalah ekonomi akibat penuaan.

Pada sisi sosial, dampak krisis demografi ini sangat terasa di kawasan rural atau pedesaan. Hanya masyarakat usia tua yang tinggal di pedesaan, sementara penduduk usia muda memilih untuk bermigrasi ke kota. Alasannya, karena kesempatan untuk belajar dan bekerja di kota-kota metropolitan seperti di Osaka dan Tokyo lebih besar. Ini membuat kota-kota kecil dan perkampungan di Jepang yang kosong memiliki suasana mencekam.

Bahkan di Nagoro, Prefektur Tokushima, terdapat desa yang dipopulasi oleh boneka-boneka berbentuk, berpakaian dan seolah olah sedang melakukan pekerjaan seperti manusia. Boneka-boneka ini dibuat oleh Tsukimi Ayano karena ayahnya merasa kesepian di Nagoro. Boneka-boneka ini me-representasikan penduduk Nagoro yang telah pergi entah karena migrasi ataupun meninggal. Dengan masyarakat yang kemungkinan akan punah, diprediksi total 896 kota di seluruh Jepang akan hilang pada tahun 2040 (Johnston, 2015). Daerah-daerah yang tidak berpenduduk berpotensi menjadi sasaran klaim teritorial negara tetangga. Jika ini terjadi, dampak krisis demografi ini bukan hanya mengancam keamanan sosio-ekonomi, namun juga keamanan militer (Ilya, n.d.).

Adapun implikasi Shoushika ini sangat dirasakan pada bidang perekonomian Jepang. Berdasarkan penelitian terbaru oleh International Monetary Fund (IMF) yang dilakukan di Jepang, hal ini mencerminkan populasi Jepang yang menyusut pada total 308.000 orang di tahun 2016. Ini berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunannya yang menurun satu poin persentase sejak 2020 sampai 2050. Fenomena Shoushika ini juga akan menambah tekanan pada keuangan publik karena pemerintah Jepang harus meningkatnya biaya kesehatan dan kesejahteraan bagi banyak warganya yang berusia lanjut (Fensom, 2017). Jika penurunan PDB terus terjadi, maka eksistensi Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-3 di dunia dapat tersingkirkan.

Ketakutan ini membuat Pemerintah Jepang dengan giat merancang kebijakan agar ekonomi Jepang tetap stabil. Namun disisi lain, fenomena ini juga dianggap akan menimbulkan kemajuan teknologi, karena pemerintah Jepang dapat menggantikan kekurangan tenaga kerja dengan robot. Ketika modal melimpah dan tenaga kerja langka, teknologi dapat mengisi

kesenjangan dan bahkan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Masa Kepemimpinan Shinzo Abe terhadap Fenomena Shoushika

Shinzo Abe adalah merupakan seorang politikus di Jepang yang telah menjabat selama 4 periode sebagai Perdana Menteri Jepang yang berasal dari Partai Demokrat Liberal, yakni pada tahun 2005-2006 dan 2012-2020. Abe menjadi perdana menteri termuda Jepang setelah masa Perang Dunia II, Abe menjadi perdana menteri di usia 52 tahun. Program Abe yang terkenal sejak beliau menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 2012 adalah "*Abenomics*" yang merupakan sebuah program untuk berusaha menaikkan tingkat inflasi, juga meningkatkan jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah untuk proyek pekerjaan umum yang besar, yang berhasil memompa miliaran dolar ke dalam pertumbuhan ekonomi Jepang (Pletcher, 2020). Pada bulan Oktober 2017, Shinzo Abe memenangkan pemilihan parlemen dan pada masa jabatan di tahun keempatnya beliau terpilih sebagai pejabat tertinggi Jepang. Shinzo Abe berasal dari keluarga yang memiliki *background* politik (kakek dan paman buyutnya menjabat sebagai perdana menteri). Awal memulai karirnya diawali dengan menjadi majelis rendah parlemen Jepang. Pada awal 2018, Abe terkena serangkaian skandal dimana ia dituduh telah menggunakan posisinya untuk memberikan bantuan terhadap sebuah lembaga pendidikan bernama Kake Gakuen milik kerabat dekatnya yakni Kotaro Keke, hal ini menimbulkan protes besar dari masyarakat dan membuat popularitas Abe terus menurun serta masyarakat yang semakin tidak percaya terhadap pemerintahan. (Forbes, n.d.)

Selain itu, adapun kekecewaan yang semakin meningkat tentang keadaan ekonomi dan standar hidup. Program ekonomi yang dipuji Abe, *Abenomics*, terdiri dari ekspansi moneter yang lebih

cepat, beberapa stimulus fiskal, dan pembicaraan tentang reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan. Tetapi hasilnya sangat sedikit, terutama dari seorang pemimpin yang telah memenangkan tiga pemilihan umum dan telah lama menikmati mayoritas parlemen yang kuat. *Abenomics* disebut sebagai program untuk mengatasi deflasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan pada tahap kedua meningkatkan angka kelahiran Jepang. Sementara harga-harga telah berhenti turun, harapan untuk memulihkan inflasi yang ringan dan pertumbuhan upah telah pupus. Meskipun pertumbuhan ekonomi antara tahun 2012 dan pandemi saat ini sedikit lebih baik daripada dekade sebelumnya, hal itu sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya guncangan besar pada skala krisis keuangan 2008 atau gempa bumi dan tsunami tahun 2011. Namun, angka kelahiran tetap datar. Yang pasti, pemerintahan Abe telah memberlakukan beberapa reformasi kecil yang berguna, termasuk kode tata kelola perusahaan yang baru, aturan pengungkapan yang lebih baik untuk perusahaan, pengeluaran penitipan anak yang lebih tinggi, dan batasan yang lebih ketat untuk lembur yang sangat lama dan berbahaya.

Namun, rencana reformasi yang lebih dalam untuk meningkatkan persaingan tidak terwujud atau terhalang oleh kepentingan bisnis tertentu. Hampir 40 persen angkatan kerja tetap memiliki kontrak jangka pendek yang berbahaya dan, meskipun lebih banyak perempuan bekerja, sangat sedikit yang berhasil menembus posisi kepemimpinan. Selama masa jabatan keduanya sebagai perdana menteri. Pengunduran diri Shinzo Abe yang tiba-tiba dikarenakan kesehatannya yang menurut serta penyakit *ulcerative colitis* yang kambuh, hal ini menjadi akhir masa jabatannya, meski pergi dengan ekonomi yang masih terbilang lemah, Abe telah membuat Jepang lebih kuat dan lebih otonom dalam urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri. (Emmott, 2020) Pada

tahun 2013, Tokyo memenangkan upayanya untuk menjadi tuan rumah acara olahraga empat tahunan karena negara tersebut berharap dapat memanfaatkan permainan untuk mempromosikan rekonstruksi daerah-daerah yang hancur akibat gempa bumi besar di Jepang Timur dan tsunami pada Maret 2011, serta bencana parah berikutnya. (Jiji, 2021)

Di bawah pengawasannya, Jepang menikmati pertumbuhan terpanjang kedua sejak 1945. Jumlah pengunjung Internasional melonjak saat Tokyo bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade tahun ini. Abe memenangkan pemilihan setelah pemilihan bahkan ketika pemerintah di seluruh dunia demokratis diguncang oleh populisme. (Johnston, 2020).

Jepang merupakan negara dengan populasi penuaan masyarakat yang cepat, dimana terdapat lansia yang berusia diatas 65 tahun berjumlah hampir lebih dari ¼ jumlah populasi yang ada di Jepang dan akan diperkirakan semakin bertumbuh dengan cepat kedepannya. Akibatnya, pemerintah Jepang harus mengatasi peningkatan kekurangan ketenagakerjaan yang diakibatkan penuaan ini, dari tahun 1990-an pemerintan sudah berfokus pada keimigrasian. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk mempromosikan partisipasi tenaga kerja pekerja lanjut usia dan perempuan atas peningkatannya imigrasi sejak tahun 2013 tenaga kerja asing meningkat hingga 40% tetapi pemerintah tetap enggan melihat kenaikan angka tersebut atau memberikan langkah eksplisit (Buzan & Hansen, 2009).

Krisis tenaga kerja diatasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut *Womenomics*, namun dirasa kurang efektifnya kebijakan tersebut sehingga dibuatlah UU Tenaga Kerja Asing dan Kebijakan Keimigrasian. Hal ini membuat Jepang ketergantungan kepada TKA untuk membantu menutupi kurangnya tenaga kerja ekonomi di sektor rendah, peningkatan permintaan akan pekerja migran dirasakan ketika mereka

juga membutuhkan pekerja di sektor konstruksi seperti the *Tokyo Summer 2020 Olympics* dan the *Tokyo Summer 2020 Paralympic*. Dilaporkan bahwa Jepang diperkirakan akan butuh sekitar 150,000 pekerja di tahun 2015-2020 (Sulistiyana, 2019).

Dampak krisis demografi yang dirasakan langsung pemerintah sebuah negara adalah pada bidang ekonomi. Sehingga kebijakan mengenai krisis demografi Jepang dibuat berorientasi pada kepentingan ekonomi. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang semakin sedikit, sementara Jepang sebagai negara kapitalis yang mendapat peringkat sebagai negara terkaya ke-3 di dunia tentunya membutuhkan tenaga kerja untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Sehingga sejak awal tahun 1990-an, pemerintah Jepang telah mengupayakan untuk mendorong kelahiran dengan memperluas kebijakan mengenai keseimbangan antara dunia kerja dan keluarga. (Waldman, 2020). Mengingat budaya kerja masyarakat Jepang yang terkenal sebagai pekerja keras serta jam kerja panjang. Dalam kebijakan ini, karyawan yang telah berkeluarga diperbolehkan untuk mengambil cuti agar dapat mengurus anak (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2015). Namun kebijakan ini dianggap tidak efektif karena terjadinya pelecehan dan hukuman di tempat kerja pada karyawan yang mengambil cuti, berupa penurunan pangkat dan pemecatan saat karyawan kembali ke kantor.

Di masa pemerintahan Shinzo Abe (2012-2020), kebijakan dalam mengatasi rendahnya populasi usia produktif yang diambil adalah dengan mendorong partisipasi kaum wanita dalam dunia kerja. Kebijakan ini disebut dengan '*Womenomics*' dimana perusahaan didorong dengan diberikan insentif untuk mempekerjakan lebih banyak wanita serta memberikan lebih banyak jabatan kepemimpinan kepada karyawan wanita.

Sebenarnya kebijakan ini merupakan realisasi gagasan yang diadopsi dari pidato Abe pada tahun 2003 (Waldman, 2020). Kebijakan ini banyak didukung oleh kaum feminis, karena kebijakan ini dianggap sebagai reformasi kaum wanita di Jepang. Namun banyak yang menilai bahwa kebijakan ini malah menjadi bumerang dan memperburuk krisis demografi di Jepang. Karena kebijakan yang mendorong wanita untuk bekerja ini membuat berumah tangga bukan lagi menjadi tujuan utama wanita Jepang dalam menjalankan hidup. Karir dianggap lebih menjanjikan, karena dengan gaji yang didapat, mereka dapat menjadi independen secara finansial. Budaya masyarakat Jepang yang kompetitif juga membuat wanita di Jepang terlalu sibuk untuk mencapai posisi karir setinggi mungkin, sehingga mereka memilih untuk menunda perkawinan dan memiliki anak, bahkan sebagian tidak ingin menikah sama sekali. Naiknya total tenaga kerja wanita secara terus-menerus mencerminkan bahwa para wanita tidak ingin lagi bereproduksi. Ini akan berakibat pada kelahiran yang akan terus berkurang (Coulmas, 2007).

Perdana Menteri Abe pada masa kepemimpinannya mengatasi krisis ini dengan mengambil langkah-langkah untuk mendukung pasangan muda dalam membesarkan anak, misalnya dengan menggratiskan pendidikan prasekolah. Pemerintah Jepang menetapkan target untuk meningkatkan angka kelahiran kembali menjadi 1,8 pada tahun 2025 – harapan tersebut kemungkinan tidak akan tercapai dengan waktu sesingkat itu, mengingat angka kelahiran hanya 1,43 pada tahun 2017 (Walia, 2019). Menanggapi populasi tua yang membludak, pemerintah Jepang membuka lapangan kerja untuk manula dan lingkungan kerja akan ditingkatkan dan memungkinkan pekerja untuk menunjukkan kemampuan mereka sepenuhnya hingga usia tua. Usia pensiun yang sebelumnya 65 tahun akan diperpanjang menjadi 70 tahun.

Dengan meremajakan masyarakat usia tua, diharapkan Jepang dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun sistem pensiun baru ini juga menimbulkan berbagai kritikan karena bertambahnya dana kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah akibat kenaikan biaya pengobatan hari tua. Selain itu, Pemerintah Jepang juga membuka gelombang imigrasi tenaga kerja asing guna memenuhi produktivitas ekonomi negara.

Jika dianalisa, pemerintah Jepang lebih banyak menggunakan kebijakan berdasarkan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan ancaman sosial dan budaya. Padahal krisis demografi ini dapat menimbulkan ancaman kepunahan warga Jepang apabila terjadi terus menerus didalam jangka waktu yang panjang dan tidak diperhatikan. Terdapat kemungkinan yang besar identitas etnis dan budaya masyarakat Jepang akan luntur bahkan punah dalam jangka beberapa abad ke depan, jika Jepang terus dimasuki imigran yang semakin besar tiap tahunnya sementara penduduk Jepang sendiri terus berkurang.

Maka kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Jepang adalah mendorong masyarakat usia produktif di Jepang untuk menikah dan mempunyai anak. Pemerintah Jepang juga perlu menyediakan perawatan kesehatan reproduksi dan sosial untuk mencapai tingkat kelahiran yang dibutuhkan agar menambah populasi yang lebih muda untuk berkontribusi pada kemajuan negara Jepang dan global (Nargund, 2009). Selanjutnya adalah menggratiskan atau menurunkan biaya pendidikan bukan hanya di tingkat pra-sekolah, namun juga ke tingkat sekolah dasar, menengah dan seterusnya. Dengan begitu masyarakat Jepang tidak perlu khawatir akan biaya hidup dan pendidikan anak yang mahal.

Pemerintah Jepang juga perlu memperkuat upaya untuk memperluas tempat layanan penitipan anak (*daycare*) yang terjangkau. Lalu kembali mentransformasi tempat kerja yang lebih

fleksibel dan ramah keluarga, termasuk mengubah budaya perusahaan Jepang yang menekankan jam kerja yang panjang. Mengingat konsekuensi demografis dan sosial ekonomi jangka panjang yang serius karena angka kelahiran rendah, pemerintah Jepang tidak punya banyak pilihan selain memperkuat kebijakan untuk membantu wanita dan pasangan agar pekerjaan dan kehidupan keluarga seimbang. Jika upaya-upaya tersebut dilakukan, populasi masyarakat Jepang akan terus terjaga dan ancaman sosial budaya dan ekonomi karena krisis demografi dapat terselesaikan. Karena pada dasarnya kebijakan kependudukan di masa kontemporer bukan hanya dalam rangka memperbaiki kesejahteraan materi saja, namun memfasilitasi dorongan untuk kelangsungan hidup kelompok. (Leroy, 1978)

Kesimpulan

Perubahan demografi menjadi fenomena baru yang menentukan di Jepang pada masa mendatang. Penurunan tingkat kelahiran yang terjadi saat ini menjadi dasar bagi penurunan populasi Jepang yang diperkirakan akan terus berlanjut. Pergeseran demografis memberikan implikasi mendalam pada keamanan sosial dan ekonomi. Pemerintah Jepang yang terlalu mementingkan bidang ekonomi saja dalam menanggulangi masalah ini membuat krisis demografi semakin memburuk.

Fenomena *Shoushika* atau penurunan angka kelahiran di Jepang kemudian timbul sebagai salah satu akibat dari krisis demografi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Jepang dimasa yang akan datang. Banyaknya faktor yang telah diuraikan dalam artikel ini cenderung menitikberatkan pada sikap masyarakat Jepang yang telah terkonstruksi dari kebijakan pemerintah Jepang itu sendiri melalui kebijakan *Womenomics*-nya hingga membentuk pemikiran di masyarakat Jepang untuk lebih

mengutamakan karir dibandingkan dengan berkeluarga apalagi memiliki anak.

Fenomena ini dinilai juga memiliki implikasi terhadap kemanan non-tradisional di negara Jepang, akibat dari penurunan usia produktif tersebut yang berimplikasi terhadap banyaknya imigran asing yang mendatangi wilayah Jepang hingga kemudian menjadi ancaman tersendiri bagi kebudayaan, sosial dan demografis di negara Jepang. Adapun pemerintah Jepang hingga saat ini masih terus mengupayakan solusi dan penanganan dari dampak yang ditimbulkan oleh fenomena Shoushika ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Coulmas, F. (2007). *Population Decline and Ageing in Japan – The Social Consequences*. Routledge.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Konishi, S., Tamaki, E., & Yoshinaga, J. (2018). *Biodemography of Fertility in Japan (Population Studies of Japan)*. Springer.
- Leroy, M. (1978). *Population and World Politics : The Interrelationships Between Demographic Factors and International Relations* (4th ed.). Springer.

Jurnal

- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- National Institute of Population and Social Security Research in Japan. (2012). *Population Projections for Japan (January 2012): 2011 to 2060*.

Internet

- Emmott, B. (2020). *The Japan that Shinzo Abe Has Left Behind*. The Japan Times.

<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/08/29/commentary/japan-commentary/japan-shinzo-abe-resignation/>

- Fensom, A. (2017). *Aging Asia: Turning Demographic Weakness to Strength Will developing Asia get old before it gets rich?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2017/08/aging-asia-turning-demographic-weakness-to-strength/>
- Forbes. (n.d.). *Shinzo Abe*. Retrieved March 29, 2021, from <https://www.forbes.com/profile/shinzo-abe/?sh=552cb6c83a99>
- Ilya. (n.d.). *Nagoro – A Creepy Japanese Village Where Dolls Replace the Departed*. Unusual Places. Retrieved December 23, 2020, from <https://unusualplaces.org/nagoro-a-creepy-japanese-village-where-dolls-replace-the-departed/>
- Jiji. (2021). *Former Prime Minister Abe Reflects on His Administration's Role in Postdisaster Reconstruction*. The Japan Times. <https://www.japantimes.co.jp/news/2021/03/05/national/prime-minister-abe-olympics-interview/>
- Johnston, E. (2015). *Is Japan becoming extinct? The projected drop in the country's population raises some fundamental questions about its political and social future*. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/16/national/social-issues/japan-becoming-extinct/#.WIHK_iOB3aZ
- Johnston, E. (2020). *"The Iconoclast" Tackles Shinzo Abe's Political Legacy*. The Japan Times. <https://www.japantimes.co.jp/culture/2020/08/22/books/book-reviews/the-iconoclast-shinzo-abe-tobias-harris/>
- Nargund, G. (2009). Declining birth rate in Developed Countries: A radical policy re-think is required. *National Center for Biotechnology*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar>

- icles/PMC4255510/
 Pletcher, K. (2020). *Abe Shinzo : Prime Minister of Japan*. Britannica Encyclopedia.
<https://www.britannica.com/biography/Abe-Shinzo>
- Pramono, S., & Purwono, A. (n.d.). *Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik*.
<file:///C:/Users/ADMINS/Downloads/485-1104-1-SM.pdf>
- Salengke, H. H. (2019). *Angka Kelahiran Bayi Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Jepang Terancam*.
<https://mediaindonesia.com/internasional/279753/angka-kelahiran-bayi-menurun-pertumbuhan-ekonomi-jepang-terancam>
- Sulistiyana, T. A. (2019). *Kerjasama Internasional Jepang dengan Indonesia dan Filipina dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Jepang* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25932>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2015). Government response to low fertility in Japan- Policy. *United Nations Expert Group Meeting on Policy Responses to Low Fertility*.
https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/pop-unpb-011_0.pdf?file=1&type=node&id=35481
- Waldman, E. (2020). *Why Japan's Push for Gender Equality Is Failing*. World Politics Review. Why Japan's Push for Gender Equality Is Failing
- Walia, S. (2019). *The Economic Challenge of Japan's Aging Crisis*. The Japan Times.
<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/11/19/commentary/japan-commentary/economic-challenge-japans-aging-crisis/>
- Worldometer. (2020). *Japan Population (LIVE)*.
<https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/>
- Yusy, W., & Rindu, A. (2011). Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang: Studi Tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial, 01*.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/4/2>